

**DISKRIMINASI NIKKEI BURAJIRU-JIN DI JEPANG
SEBAGAI PEKERJA SEKTOR TIDAK TERAMPIL TAHUN 2014-2020
(STUDI KASUS PERUSAHAAN BIDANG MANUFAKTUR
DI PEFEKTUR AICHI DAN PEFEKTUR SHIZUOKA)**

Refananta Andryan Airlangga¹, Kurniawaty Iskandar²
Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia¹²

refananta.andryan@ui.ac.id¹, kurniawati@ui.ac.id²

Abstract

The *Nikkei Burajiru-jin* is marginalized so that it is difficult for them to improve social economic status while living in Japan. This study used social disorganization theory by Rubington and Weinberg to explain the social conflict that occurred between the Japanese and the *Nikkei Burajiru-jin*. This research uses the qualitative method with a case study. Data collection techniques utilizes literature studies using book sources, journals, website articles and social media discourse. The results showed that social disintegration that occurred between the Japanese and *Nikkei Burajiru-jin* due to differences in culture and nature between the two groups. And the presence of stereotypes against non-Japan, where even though Japanese blood flows to the *Nikkei*, but is deemed impure and adheres to a different value system with those who are genuinely Japanese. Some practices of exclusion as unskilled workers in Japanese companies experienced by *Nikkei* workers and this can be proven through interviewees with *Nikkei Burajiru-jin* that they realize the difficulties of improving careers in Japan. Working in the factories became the only way to secure a job easily. The study also found that the failure of the implementation of the concept of multiculturalism in Japan which caused negative prejudices and discriminatory behavior by the government and the Japanese community to the *Nikkei Burajiru-jin*. This which then resulted in the difficulties of the *Nikkei Burajiru-jin*'s experience assimilating in Japan.

Keywords: Discrimination; Minority; *Nikkei Burajiru-jin*; Unskilled Laborers

Abstrak

Nikkei Burajiru-jin termarginalisasi sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan status ekonomi sosial saat tinggal di Jepang. Penelitian ini menggunakan teori disorganisasi sosial oleh Rubington dan Weinberg untuk menjelaskan konflik sosial yang terjadi antara masyarakat Jepang dan *Nikkei Burajiru-jin*. Metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data memanfaatkan studi literatur menggunakan sumber buku, jurnal, artikel website serta wacana media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disintegrasi sosial yang terjadi antara masyarakat Jepang dan *Nikkei Burajiru-jin* akibat perbedaan kultur dan sifat alamiah antar dua kelompok tersebut. Dan adanya stereotipe terhadap non Jepang, dimana walaupun darah Jepang mengalir pada *Nikkei*, tetapi dipandang tidak murni dan menganut sistem nilai yang berbeda dengan mereka yang murni asli Jepang. Beberapa praktek pengucilan sebagai pekerja tidak terampil di perusahaan Jepang dialami oleh pekerja *Nikkei* dan hal ini dapat dibuktikan melalui catatan wawancara dengan *Nikkei Burajiru-jin* bahwa mereka menyadari kesulitan meningkatkan karir di Jepang. Pekerjaan di pabrik menjadi satu-satunya lapangan pekerjaan yang mudah dimasuki. Penelitian ini juga menemukan bahwa gagalnya penerapan konsep multikulturalisme di Jepang menimbulkan prasangka negatif dan perilaku diskriminatif oleh pemerintah dan masyarakat Jepang kepada *Nikkei Burajiru-jin*. Ini yang kemudian mengakibatkan *Nikkei Burajiru-jin* mengalami kesulitan berasimilasi di Jepang.

Kata Kunci: Diskriminasi; Minoritas; *Nikkei Burajiru-jin*; Buruh Kasar

Pendahuluan

Krisis ketenagakerjaan mendorong pemerintah Jepang untuk membuat kebijakan revisi pada Undang-Undang

Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi Jepang (ICRRA). Undang-undang ini mulai diimplementasikan oleh pemerintah

Jepang tahun 1990. Tujuan utamanya yakni untuk merepatriasi warga *nisei* dan *sansei* para *Nikkei* (keturunan emigran Jepang) guna menyokong kebutuhan ketenagakerjaan di Jepang. Maksud dari repatriasi adalah pemulangan kembali warga negara yang tinggal di negara asing ke negara asalnya. *Nisei* merupakan sebutan generasi kedua *Nikkei* yang lahir dari tahun 1930 sampai 1940-an. Sedangkan, sebutan *sansei* diperuntukkan untuk generasi ketiga *Nikkei* yang lahir melewati tahun 1945 (Nishida, 2017). Brazil merupakan salah satu negara yang menjadi target untuk memulai sistem perekrutan tenaga kerja asing ke Jepang.

Jepang dan Brazil adalah dua negara yang telah menyimpan sejarah panjang dalam bekerja sama menangani berbagai isu di kedua negara tersebut. Kerja sama antar Jepang dan Brazil bermula pada tahun 1880-an ketika Jepang mengalami resesi ekonomi dan ledakan populasi. Hal tersebut membuat pemerintah Jepang memandang bahwa emigrasi sebagai solusi untuk mengatasi masalah ledakan populasi yang terjadi di Jepang. Salah satu negara yang menjadi target emigrasi adalah Brazil.

Di sisi lain, Brazil yang baru saja menghapus sistem perbudakan pada tahun 1888 justru mengalami masalah kekurangan tenaga kerja, terutama pada sektor perkebunan kopi, kapas dan sutra. Untuk menanggapi solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah Brazil menyetujui kerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menerima masyarakat Jepang yang melakukan emigrasi ke Jepang. Sasaki (2008) menyebutkan bahwa terdapat sekitar 188.000 warga Jepang yang beremigrasi ke Brazil dari tahun 1899 hingga 1941. Emigran Jepang ke Brazil disebut juga dengan *Nikkei* atau *Nikkeijin*. *Nikkei* atau *Nikkeijin* memiliki arti sebagai keturunan warga asli Jepang yang telah

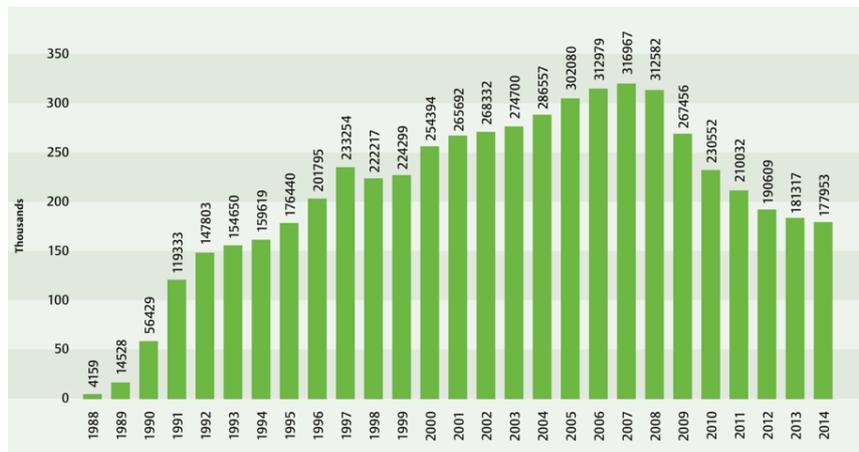
menetap di negara lain dalam jangka waktu yang lama. Selama kependudukannya, *Nikkeijin* berhasil melakukan integrasi di Brazil. *Nikkeijin* juga turut membentuk komunitas diaspora Jepang yang cukup signifikan melalui *nisei* dan *sansei* keturunan mereka. Keturunan emigran masyarakat asli Jepang dari Brazil disebut sebagai *Nikkei Burajiru-jin*.

Berdasarkan data sensus yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang (dalam Nishida, 2017), terdapat sekitar 2 juta populasi *Nikkei* yang berada di Brazil. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang melihat peluang untuk *Nikkei* dijadikan solusi mengisi kekurangan ketenagakerjaan Jepang. Tak hanya itu, Jepang turut memanfaatkan “kembali”nya *Nikkei Burajiru-jin* sebagai tanggungan wajib pajak dan pemicu kebangkitan produktivitas berbagai sektor industri di Jepang. Perevisian Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi (ICRRA) Jepang memberikan para *Nikkei* hak untuk memperoleh *long-term resident visa* (izin tinggal jangka panjang). Mereka beserta anggota keluarganya diberikan izin untuk tinggal dan bekerja di Jepang tiga hingga lima tahun dengan sedikit batasan pada aktivitas ekonomi.

Ledakan jumlah *Nikkei Burajiru-jin* ke Jepang dimulai dari tahun 1991 sebanyak 100,000 orang. Kemudian bertambah sebanyak 200.000 orang di tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 sebanyak 316.000 orang (Rompay-bartels, 2015). *Nikkei Burajiru-jin* disebut sebagai kelompok *nikkei* terbesar yang menetap di Jepang hingga tahun 2008. Hal ini karena sebagian dari *Nikkei Burajiru-jin* terpaksa kembali ke Brazil karena kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi Jepang. Pada tahun 2013, jumlah *Nikkei Burajiru-jin* di Jepang yakni 181.317 orang. Sebagian besar dari mereka tinggal

di prefektur Aichi, Shizuoka, Kanagawa, Saitama dan Gunma (Morita, 2017).

Gambar 2: Jumlah Penduduk *Nikkei Burajiru-jin* di Jepang tahun 1988-2014



Sumber: Ministry of Justice Japan (Rompay-bartels, 2015)

Pemerintah Jepang berasumsi bahwa *Nikkei Burajiru-jin* akan lebih mudah berasimilasi di Jepang dibandingkan warga asing lainnya karena sudah pernah terekspos dengan bahasa dan budaya Jepang melalui generasi orang tua atau kakek-neneknya. Terlebih, mayoritas *Nikkei Burajiru-jin* juga memiliki ciri-ciri fisik yang mirip selayaknya masyarakat asli Jepang. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang memutuskan untuk memudahkan proses imigrasi untuk para *Nikkei Burajiru-jin* agar dapat kembali ke tanah air nenek moyangnya.

Pada dasarnya, Jepang termasuk salah satu negara dengan tingkat homogenitas yang tinggi. Secara harfiah, homogenitas berarti suatu kelompok yang mempunyai kesamaan jenis, sifat atau watak. Konsep masyarakat homogen telah disepakati oleh masyarakat Jepang sejak tahun 1970-an (Graburn & Earl, 2008). Konsep tersebut kemudian menanamkan anggapan kepada masyarakat Jepang bahwa orang selain keturunan Jepang adalah orang lain. Sedangkan, kebutuhan tenaga kerja di Jepang seakan memaksa negara tersebut untuk melepaskan sifat

homogenistiknya sebagai hasil dari proses internasionalisasi dan globalisasi. Akibatnya, masyarakat Jepang sulit beradaptasi dengan warga asing.

Graburn & Earl (2008) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Jepang dalam upayanya menghapus perbedaan kultur justru membuat posisi sosial kelompok minoritas semakin di bawah. Pemerintah Jepang yang mengutamakan kepentingan negara dan kelompok mayoritas membuat negara matahari tersebut menjauh dari konsep multikulturalisme dan praktek asimilasi sistematis warga asing. Konsep “*the Japanese*” merupakan gagasan yang membedakan ciri-ciri masyarakat asli Jepang dengan warga asing dan berfungsi sebagai kategorisasi yang membuat seragam warga yang tinggal di negara Jepang. Konsep monokulturalisme yang diadopsi Jepang secara tidak langsung mendukung sifat xenofobia atau penolakan terhadap orang-orang yang tidak dipercayai, yakni warga asing Jepang memiliki tiga kategori umum kelompok minoritas yang memiliki sejarah panjang berinteraksi dengan masyarakat asli

Jepang. Kelompok pertama adalah masyarakat “Pribumi” seperti Ainu dan warga Okinawa. Kedua adalah “*Buraku*”, keturunan warga Tiongkok dan Korea yang dibawa ke Jepang pada saat Perang Dunia II. Kelompok minoritas terakhir adalah kelompok pekerja migran asing yang mayoritas berasal dari negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Selatan (Graburn & Earl, 2008).

Nikkei Burajiru-jin masuk ke dalam kategori yang ketiga. Meskipun *Nikkei Burajiru-jin* termasuk sebagai keturunan Jepang namun mereka tetap dianggap kelompok minoritas. Hal ini karena mereka dianggap tidak dapat menampilkan sifat beserta norma yang menunjukkan bahwa mereka adalah warga asli Jepang. Nishida (2017) menyebutkan bahwa ciri fisik dan sifat para *Nikkei Burajiru-jin* dibedakan dengan masyarakat asli Jepang. “*Pure Japanese*” merupakan sebutan para masyarakat asli Jepang agar dibedakan dengan kelompok para pendatang dari Brazil tersebut. Sifat homogenitas yang telah terurai dalam kolektif masyarakat Jepang tidak mudah dirubah sehingga menyebabkan konflik antara diferensiasi atau unsur-unsur yang tidak dikenal. Munculnya sebutan “perilaku Brazil” oleh masyarakat asli Jepang digunakan untuk membedakan atau mengasingkan antara suatu kelompok sosial tertentu (Tsuda, 2003). Sebutan “perilaku Brazil” dalam dalam terminologi Rubington dan Weinberg (2003), dapat dikategorikan sebagai upaya pengecapan (*labelling*) oleh masyarakat dominan mempunyai tujuan memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat asli Jepang yang ber ‘perilaku Jepang’ dan membedakannya dengan mereka yang ber ‘perilaku Brazil’.

Bellini (2006) mengungkapkan bahwa *Nikkei Burajiru-jin* termasuk dalam kelompok yang tidak dihormati oleh orang

Jepang. Paparan oleh Bellini menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi yang dialami *Nikkei Burajiru-jin* yakni karena sebagian besar dari mereka tidak dapat berbahasa Jepang dan menyesuaikan diri dengan budaya Jepang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa alasan pemerintah Jepang mendorong *Nikkei Burajiru-jin* untuk bermigrasi ke Jepang karena mereka dianggap telah mengenal bahasa dan budaya Jepang. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga mereka dianggap sebagai *gaijin* (orang asing).

Kondisi di atas merupakan gambaran dari konsep multikulturalisme. Multikulturalisme adalah keragaman budaya yang dimiliki oleh berbagai kelompok sosial dan tidak terlepas dari konsep adanya kelompok dominan dan kelompok minoritas di suatu wilayah tertentu. (Joppke, 2017) menjelaskan bahwa multikulturalisme termasuk konsep di mana perbedaan kebudayaan harus hidup berdampingan di tempat yang sama. Ia turut menjelaskan bahwa multikulturalisme merupakan “sifat” yang dimiliki kelompok minoritas dan ada pengakuan atas perbedaan-perbedaan sifat yang dimiliki oleh kelompok tersebut.

Tak dapat dipungkiri jika interaksi antar individu dalam kelompok sosial merupakan hal penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman ataupun konsekuensi sosial yang negatif. Iskandar (2019) menyebutkan bahwa proses interaksi sosial membutuhkan informasi tentang individu atau kelompok yang ditemuinya agar dapat memahami situasi dan konteks sehingga ada penyesuaian perilaku untuk mendapatkan respon yang diinginkan oleh lawan interaksinya. Adanya perilaku diskriminatif dan marginalisasi yang dialami oleh *Nikkei Burajiru-jin* menunjukkan adanya perenggangan hubungan oleh kedua kelompok sosial tersebut. Perbedaan pemahaman sifat

kultur yang dipahami oleh masyarakat Jepang dan *Nikkei Burajiru-jin* berpotensi untuk memicu adanya konflik antara kelompok sosial yang dominan dan kelompok sosial minoritas.

Nikkei Burajiru-jin termasuk kelompok minoritas karena mereka yang melakukan bermigrasi dari negara lain ke suatu negara. Alasan para imigran tersebut bermigrasi tidak lain karena sumber daya, kesamaan budaya, undang-undang migrasi dan keterbukaan negara untuk imigran. Masalah karier untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibanding berada di negara tanah air mereka (Iskandar, 2019).

Sehubungan dengan *Nikkei Burajiru-jin* dianggap sebagai pendatang kelompok bawah, maka mayoritas dari mereka ditempatkan pada sektor pekerjaan tidak terampil sebagai buruh pabrik. Pekerjaan tidak terampil merupakan pekerjaan yang tergolong dalam jenis 3K. Pekerjaan 3K adalah *kitsui* (sulit), *kitanai* (kotor) dan *kiken* (berbahaya). Umumnya, pekerjaan tidak terampil merupakan pekerjaan *blue-collar jobs* atau pekerjaan buruh yang tidak diinginkan orang Jepang, seperti di bidang jasa, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Berdasarkan laporan data oleh Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang (dalam Nishida, 2017), bahwa pada tahun 2014 sebanyak 47.354 orang *Nikkeijin* bekerja di pabrik manufaktur. Ishikawa (2015) menyebutkan bahwa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dasar seperti bahasa Jepang dan etika komunikasi dapat menghalangi *Nikkei Burajiru-jin* untuk memperoleh *white-collar jobs* atau pekerjaan perkantoran. *White-collar jobs* merupakan

pekerjaan yang dianggap profesional dan sebagai suatu tanda kestabilan finansial oleh warga asli Jepang. Jenis-jenis pekerjaan yang biasanya diasosiasikan dengan *white-collar jobs* adalah IT, akuntansi, konsultan, *public relations* (PR), *human resources* (HR) dan pekerja negeri sipil. *White-collar jobs* lebih diincar oleh warga asli Jepang sedangkan *blue-collar jobs* dihindari. *Blue-collar jobs* jauh lebih mudah untuk diperoleh warga asing (Ishikawa, 2015).

Adapun pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh *Nikkei Burajiru-jin* serta penyebab mereka mendapat pengucilan sebagai pekerja sektor tidak terampil. Pembahasan diskriminasi terhadap *Nikkei Burajiru-jin* dibatasi hanya pada dua wilayah, yakni Prefektur Aichi dan Prefektur Shizuoka. Pemilihan kedua wilayah tersebut berdasarkan populasi *Nikkei Burajiru-jin* terbanyak di Jepang. Persebaran *Nikkei Burajiru-jin* di Jepang ditunjukkan pada peta dalam gambar 2. Melalui peta tersebut dapat terlihat bahwa wilayah yang berwarna merah pekat adalah wilayah yang penduduk *Nikkei Burajiru-jin*nya paling banyak dibandingkan wilayah di Jepang lainnya. Dibandingkan prefektur Gunma dan prefektur Shiga, *Nikkei Burajiru-jin* lebih mendominasi di wilayah prefektur Aichi dan prefektur Shizuoka (Aichi Prefectural Government, 2021).

Gambar 2: Peta Persebaran *Nikkei Burajiru-jin* di Jepang



Sumber: Data Statistik Penduduk Asing, 2019

Selain itu, kajian ini juga mengungkap kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang dalam mengatasi konflik yang terjadi antara orang Jepang dan *Nikkei Burajiru-jin* di Jepang. Kajian ini akan menggunakan konsep multikulturalisme untuk membahas identitas kelompok minoritas *Nikkei Burajiru-jin*. Sedangkan, permasalahan pengucilan *Nikkei Burajiru-jin* sebagai pekerja sektor tidak terampil (*unskilled worker*) di perusahaan Jepang akan dibahas dengan menggunakan teori disorganisasi sosial dan multikulturalisme.

Disorganisasi Sosial & Multikulturalisme

Pada hakikatnya, masyarakat yang homogen dapat melakukan integrasi sosial yang baik. Integrasi sosial berarti proses memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai, hubungan dan institusi. Integrasi sosial memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik atas dasar persamaan hak dan kesempatan, kesetaraan dan martabat (Ferguson, 2008). Ahli teori terdahulu menyebutkan beberapa faktor yang dapat menghambat integrasi sosial. Hambatan tersebut diantaranya disrupsi hubungan keluarga, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk dan komposisi penduduk.

Proses globalisasi yang meliputi kegiatan migrasi, urbanisasi dan industrialisasi menciptakan disorganisasi sosial dengan melihat hubungan antara kelompok primer dan kelompok sekunder. Disebutkan bahwa jika perkembangan budaya dalam masyarakat tidak seimbang dengan perkembangan IPTEK, maka budaya akan mengalami ketertinggalan (Burlian, 2016). Oleh sebab itu, masyarakat yang mengalami disorganisasi sosial cenderung menghadapi tantangan berupa permasalahan ekonomi, kriminalisme, dan rasisme atau konflik etnis.

Rubington dan Weinberg (2003) dalam bukunya yang berjudul *The Study of Social Problems: The Seven Perspectives*, menjelaskan bahwa terdapat lima karakteristik dalam disorganisasi sosial. Lima karakteristik tersebut diantaranya definisi (*definition*), sebab (*causes*), kondisi (*conditions*), konsekuensi (*consequences*) dan solusi (*solutions*). Disorganisasi sosial didefinisikan sebagai kegagalan dari peraturan yang berlaku. Jenisnya terbagi menjadi tiga yakni ketiadaan norma, konflik kultur dan kegagalan berhubungan. Sebab dari disorganisasi sosial karena adanya perubahan sosial yang dapat membuat berbagai aspek sistem sosial mengalami ketidakcocokan sehingga menciptakan kondisi yang merubah keseimbangan dinamisme. Kondisi

tersebut dapat berupa teknis, demografis atau perubahan sosial.

Munculnya penyakit mental dan stres dapat dihasilkan sebagai konsekuensi dari disorganisasi sosial. Bagi sistem sosial, disorganisasi sosial dapat memicu tiga jenis konsekuensi. Pertama, adanya perubahan di dalam sistem sebagai respons atau adaptasi yang membuat sistem kembali mendapatkan keseimbangan. Kedua, sistem yang akan terus berlangsung dalam keadaan normal walaupun adanya sosial disorganisasi. Ketiga, sistem mengalami penyesuaian karena disorganisasi yang begitu besar sehingga menyebabkan penghancuran sistem itu sendiri. Implementasi dalam mengatasi disorganisasi sosial pada dasarnya dapat dilakukan ketika proses diagnosa sudah tepat, misalnya dengan memperlambat berbagai perubahan teknis.

Secara umum, masyarakat multikultural berangkat dari proses internasionalisasi. Masyarakat multikultural memiliki struktur tatanan sosial yang berbeda satu sama lain, baik secara nilai kultural maupun ekonomi (Warsito, 2010). Konsep masyarakat multikultural mengungkap pemahaman terhadap multikulturalisme.

Multikulturalisme mengacu pada keragaman budaya yang muncul dari keberadaan dua atau lebih kelompok dalam masyarakat di mana perspektif dan praktik individu menghasilkan rasa identitas kolektif yang unik (Barakoska, 2013). Dengan kata lain, multikulturalisme menunjukkan keadaan masyarakat yang berkumpul menjadi satu dengan berbeda-beda baik berdasarkan etnis, geografis, agama dan budaya yang berusaha mendapatkan posisi dan perlakuan sama dalam tatanan sosial ekonomi.

Multikulturalisme bermula dari pemahaman bahwa memberikan hak sipil dan politik yang setara merupakan

pencapaian dari demokrasi. Namun, hal tersebut tentu tidak cukup mengatasi diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Kelompok minoritas, kelompok budaya yang terpinggirkan justru dirugikan bahkan di negara demokratis. Menurut Kymlicka (2011), terdapat dua aspek munculnya multikulturalisme yakni adanya migrasi suatu kelompok ke suatu wilayah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Proses migrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya menyebabkan diskriminasi berbasis budaya. Maka dari itu diperlukan pengaturan khusus yang memungkinkan budaya minoritas untuk bertahan dan berkembang di arena publik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk memaknai suatu fenomena yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama melakukan interpretasi data atau memaknai data menggunakan kata-kata (Marshall dan Rossman dalam Creswell, 2016). Strategi penelitian yang digunakan untuk mengulas data yakni dengan metode studi kasus diskriminasi *Nikkei Burajiru-jin* sebagai pekerja tidak terampil di wilayah prefektur Aichi dan prefektur Shizuoka.

Sehubungan dengan keterbatasan akses mendapatkan informan *Nikkei Burajiru-jin*, peneliti menggunakan data yang telah terunggah di laman sejumlah website. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan video Youtube yang berjudul "*Struggles of Second Generation Brazilians in Japan*" oleh Deana Mitchell (2016) yang diproduksi oleh Berkely Graduate School of Journalism, University of California. Di

dalam video tersebut, terdapat informan-informan *Nikkei Burajiru-jin* yang memberikan informasi seputar kehidupan sehari-harinya sebagai pekerja tidak terampil di Jepang. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal dan artikel website.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur. Menurut Bryman (2012) studi literatur merupakan sebagai ulasan kritis yang berasal dari hasil penelitian yang telah eksis sebelumnya. Studi literatur digunakan untuk mengetahui beberapa hal penting terkait isu atau topik yang diangkat, bagaimana hasil studi tersebut muncul, dan kontroversi seputar topik penelitian tersebut. Selain itu, studi literatur digunakan sebagai perbandingan penelitian dan mengukur data-data yang diketahui sebelumnya agar penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai buku dan jurnal seputar kehidupan para *Nikkei Burajiru-jin* di Jepang.

Hasil dan Pembahasan

Studi ini menemukan bahwa mayoritas *Nikkei Burajiru-jin* mengalami diskriminasi dari masyarakat Jepang karena perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai Jepang. Diskriminasi terhadap *Nikkei Burajiru-jin* berdampak pada kesempatan kerja yang semakin terbatas diberikan kepada mereka. Padahal tujuan para *Nikkei Burajiru-jin* datang ke Jepang yakni untuk mencari keuntungan secara ekonomi sehingga mereka yang datang merupakan tenaga kerja sementara yang tidak terampil. Pekerja tersebut disebut sebagai “*dekasegi*” yang memiliki arti “pekerja migran sementara” dalam bahasa Jepang.

Para *Nikkei Burajiru-jin* yang datang ke Jepang mengalami proses perubahan status sosial. Nishida (2017) menjelaskan bahwa mereka yang semulanya merupakan bagian dari kelompok etnis dominan di negara Brazil berubah menjadi kelompok etnis minoritas saat pindah ke negara Jepang. Perubahan status sosial tersebut menjadi salah satu faktor mereka kerap mendapatkan perilaku diskriminatif dan marginalisasi oleh kelompok etnis yang dominan. Pemerintah Jepang juga dikatakan kurang tanggap dengan permasalahan diskriminasi antar etnis ini. Kebijakan yang mengatur tentang diskriminasi antar etnis tidak memberikan dampak yang signifikan dan belum dapat secara efektif memperjuangkan hak kaum minoritas seperti *Nikkei Burajiru-jin*. Oleh sebab itu, hingga saat ini, *Nikkei Burajiru-jin* menghadapi berbagai rintangan dalam upayanya untuk berasimilasi di Jepang.

Stereotipe kepada Nikkei Burajiru-jin

Masyarakat asli Jepang memiliki prasangka negatif terhadap para *Nikkei Burajiru-jin*. Tsuda (2003) menjelaskan bahwa prasangka negatif tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa negara Brazil merupakan negara dunia ketiga yang kesulitan untuk berkembang dengan baik sehingga memiliki penduduk yang miskin dan tidak berpendidikan. Selain itu, mayoritas *Nikkei Burajiru-jin* yang datang ke Jepang merupakan pekerja migran sementara yang mayoritas bekerja di sektor 3K sehingga ada pandangan bahwa para *Nikkei Burajiru-jin* hanya mampu bekerja kasar dan tidak cukup terampil melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Adapun komentar dari seorang masyarakat asli Jepang yang disembunyikan identitasnya (dalam Tsuda (2003) menjelaskan sebagai berikut:

“Saya sama sekali tidak bisa menghormati para dekasegi Nikkeijin. Mereka datang ke Jepang dari Brazil untuk mendapatkan uang saja setelah orang tua mereka meninggalkan negara Jepang puluhan tahun yang lalu. Jika mereka meninggalkan Jepang dan melarikan diri ke Brazil, itu karena mereka miskin dan tidak dapat bertahan hidup di sini. Dengan alasan itu, mereka seharusnya tetap di Brazil saja karena negara Jepang kaya dan mereka masih tetap miskin di Brazil.”

Ada gambaran bahwa negara dan penduduk Brazil diasosiasikan dengan kemiskinan dan status kelas rendah. Masyarakat asli Jepang beranggapan bahwa para *Nikkei Burajiru-jin* datang ke Jepang hanya untuk bekerja serabutan dan mencari keuntungan finansial sehingga mengasosiasikannya dengan keadaan hidup mereka yang *“mijime”* atau sengsara saat tinggal di Brazil maupun di Jepang. Adapun prasangka salah terhadap negara Brazil yang sebagaimana dijelaskan oleh Oda (dalam Morita, 2017):

“Mereka (rekan-rekan kerja warga asli Jepang) menanyakan saya berbagai hal. Mereka bertanya apakah ada gedung di Brazil dan apakah penduduk Brazil tinggal di hutan? Saat saya menjelaskan bahwa kota asal usul saya Sao Paulo sangat mirip dengan kota Tokyo, mereka tidak dapat mempercayainya!”

Padaحال, mayoritas para *Nikkei Burajiru-jin* justru berpendidikan tinggi dan dari kelas menengah. Mereka memiliki latar belakang sebagai pekerja profesional ataupun sebagai pemilik bisnis sebelum mereka berangkat dan bekerja di Jepang. Nishida (2017) menjelaskan bahwa para *Nikkei Burajiru-jin* rela untuk mengalami

“declassing” atau kehilangan status sosial mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh jenis pekerjaan yang mereka dapatkan yang mayoritasnya sebagai pekerja pabrik manufaktur Jepang. Sosialisasi dari media juga berpengaruh terhadap pemahaman Jepang terhadap kondisi suatu negara. Ketidaktahuan atau ketiadaan informasi dapat mempengaruhi pandangan negatif. Seperti yang dinyatakan oleh Enzensberger dalam Steinberg (2017) bahwa kekuatan mediasi memiliki kekuatan untuk mengorganisir massa.

Prasangka tersebut melahirkan pandangan negatif terhadap *“ethnic qualities”* atau sifat *Nikkei Burajiru-jin* di mana masyarakat Jepang hanya melihat konteks stereotip atas kelompok sosial tersebut. Kingsberg (2014) mengatakan bahwa asimilasi merupakan suatu proses untuk menjadikan suatu individu atau kelompok sebagai bagian dari anggotanya. Untuk dapat berasimilasi dengan baik, maka harus ada penerimaan *“qualities”* atau sifat yang dinilai cocok dan perlu menghapus beberapa karakteristik yang dimilikinya untuk dapat disertakan dan diterima sebagai bagian dari anggota. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rubington dan Weinberg (2003) bahwa ketidakcocokan dalam masyarakat adalah gejala dari adanya disorganisasi sosial.

Adanya sebutan *“perilaku Brazil”* kepada *Nikkei Burajiru-jin* dan membedakannya dengan *“perilaku warga asli Jepang”* menunjukkan kegagalan yang jelas akan hubungan dari masyarakat Jepang dan *Nikkei Burajiru-jin*. Di samping itu, konflik kultur seperti perilaku berbicara bahasa Portugis dengan keras, memakai busana yang aneh, dan melakukan *“kebiasaan asing”* menurut warga asli Jepang juga merupakan bukti adanya disintegrasi sosial.

Diskriminasi Nikkei Burajiru-jin Sebagai Pekerja Tidak Terampil di Prefektur Aichi dan Prefektur Shizuoka

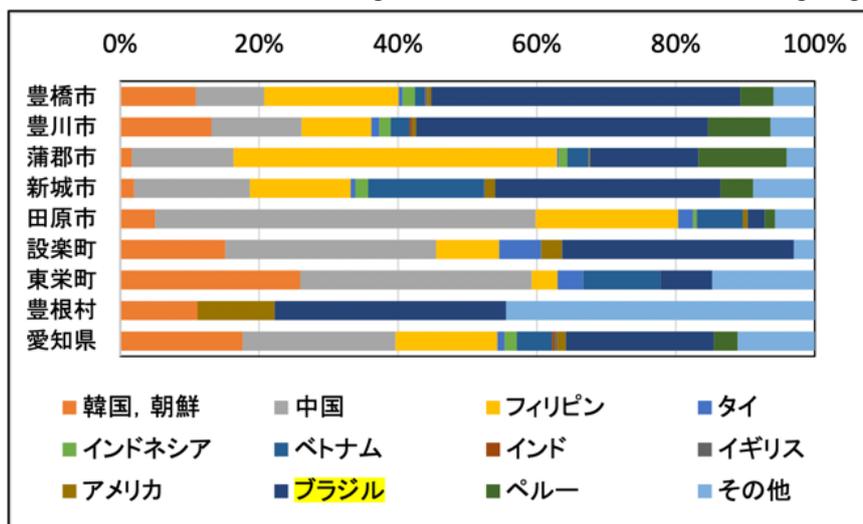
Takenoshita (2013) menjelaskan bahwa sebagian besar *Nikkei Burajiru-jin* memiliki kemampuan bahasa Jepang yang terbatas dan kualifikasi keterampilan yang kurang. Status *Nikkei Burajiru-jin* sebagai “pekerja migran” yang hanya tinggal dan bekerja untuk sementara waktu menjadi faktor dari perlakuan diskriminatif oleh masyarakat Jepang.

Ironisnya, perlakuan diskriminatif tersebut berpengaruh pada pasar tenaga kerja yang diperuntukkan oleh *Nikkei Burajiru-jin*. Minimnya integrasi *Nikkei Burajiru-jin* ke dalam masyarakat Jepang menyebabkan kesempatan bekerja *Nikkei Burajiru-jin* terbatas. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor pekerjaan tidak terampil yang bersifat tidak stabil dan tidak didukung dengan asuransi baik keamanan maupun kesehatan (Ishikawa, 2015).

Sektor pekerjaan terampil yang dimaksud contohnya di bidang manufaktur.

Dilansir dari halaman Konseling Hukum Osaka dan Amagasaki (Arte Osaka, 2015), dinyatakan bahwa *Nikkei Burajiru-jin* bekerja di bidang manufaktur yang terkonsentrasi di wilayah Tokai dari prefektur Aichi dan prefektur Shizuoka seperti perusahaan industri Toyota, Honda, Suzuki dan Yamaha. Konsentrasi wilayah tersebut yakni karena alasan jumlah populasi *Nikkei Burajiru-jin* yang cukup besar tinggal di kedua prefektur tersebut. Data per Desember 2019 dari pemerintah prefektur Aichi menunjukkan bahwa *Nikkei Burajiru-jin* menempati posisi sebagai penduduk orang asing terbesar yakni sebanyak 60,181 orang. Sedangkan, *Nikkei Burajiru-jin* yang menempati prefektur Shizuoka yakni sebanyak 31,009 orang (Higashi Mikawa Regional Research Center 2019).

Gambar 3: Presentase Penduduk Asing di Prefektur Aichi Berdasarkan Kewarganegaraan



Sumber: Higashi Mikawa Regional Research Center (2019)

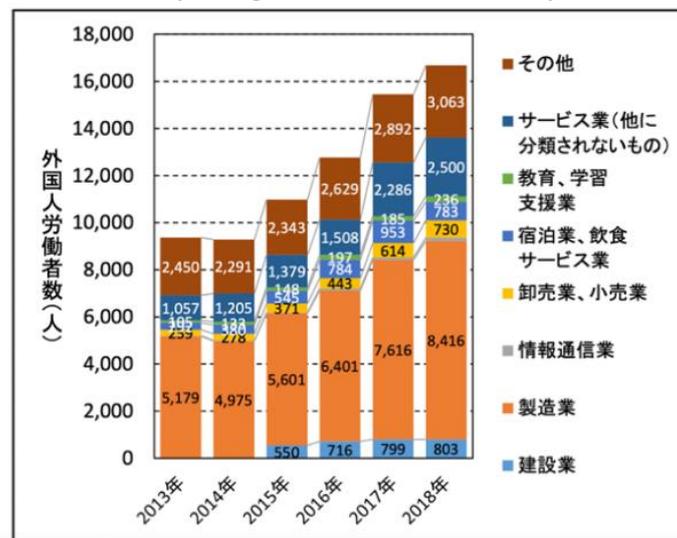
Melalui laporan pusat penelitian salah satu regional di prefektur Aichi ditunjukkan data setiap lima tahun sekali dari tahun 2000 sampai 2015 bahwa

penduduk Brazil (*Nikkei Burajiru-jin*) terus mendominasi jumlah penduduk asing di wilayah tersebut. Jika dikelompokkan berdasarkan wilayah regional, terlihat

pada gambar 3 Brazil menjadi penduduk asing terbanyak setidaknya di lebih dari lima wilayah prefektur Aichi. Wilayah Shitara sebesar 98%, wilayah Toyohashi sebanyak 85%, wilayah Shinshiro sejumlah 83%, wilayah Toyokawa sejumlah 82%, dan wilayah Toei sebanyak 81%. Posisi

berikutnya yang mendominasi setelah penduduk Brazil adalah penduduk dari Tiongkok dan Filipina. Populasi penduduk asing yang paling sedikit di prefektur Aichi yakni penduduk dari Korea dengan rata-rata 20%.

Gambar 4: Jumlah Pekerja Asing Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Prefektur Aichi



Sumber: Higashi Mikawa Regional Research Center (2019)

Berdasarkan data pada gambar 4 di atas terlihat grafik yang menunjukkan pengelompokan jumlah pekerja asing berdasarkan sektor pekerjaan. Jika melihat pada jumlah penduduk yang bekerja pada bidang manufaktur (ditunjukkan oleh warna oranye), maka dapat dikatakan bahwa posisi ini memiliki jumlah terbesar dibandingkan bidang lainnya. Bahkan, sektor pekerjaan manufaktur terus dibutuhkan dan bertambah setiap tahunnya terhitung dari tahun 2013 sampai 2018. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa dominasi penduduk prefektur Aichi adalah *Nikkei Burajiru-jin* dan pekerjaan yang banyak ditempati oleh sebagian besar dari mereka tentunya terletak juga pada sektor manufaktur.

Di samping itu, unggahan video dari Youtube milik Deana Mitchell (2016)

menggambarkan secara singkat akan kenyataan *Nikkei Burajiru-jin* yang bekerja di salah satu perusahaan manufaktur sebagai pekerja tidak terampil. Salah seorang informan *Nikkei Burajiru-jin* yang diwawancarai dalam video tersebut bernama Sonia Shibukawa, perempuan paruh baya dari generasi kedua atau *nisei*. Sonia bekerja di perusahaan Suzuki di prefektur Shizuoka, Jepang. Ia mengatakan dalam wawancaranya bahwa pekerjaan yang ia lakukan di perusahaan sangat sibuk dan melelahkan. Ia bahkan harus bekerja selama 12 jam per hari selama 30 hari dalam sebulan. Sonia pun juga mengatakan bahwa meskipun ia keturunan Jepang, namun ia terus dipandang sebagai orang asing oleh masyarakat Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus yang dialami oleh Sonia adalah salah satu

contoh dari bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap *Nikkei Burajiru-jin* di Jepang.

Kasus yang sama turut dirasakan oleh salah seorang *nisei* bernama Sara Toyoshima yang merupakan penduduk di prefektur Shizuoka. Ia mengatakan bahwa rasanya sulit untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Ibu dari dua anak ini menyebutkan bahwa ia terpaksa bekerja di pabrik karena membutuhkan uang untuk menafkahi anak-anaknya. Bahkan, Sara menyatakan bahwa ia pernah ditolak oleh beberapa perusahaan karena ia mempunyai anak. Menanggapi kasus oleh Sara, maka dapat dilihat bahwa Jepang membatasi pekerjaan kepada Sara, sebagai *Nikkei Burajiru-jin*, ditambah lagi dengan statusnya sebagai ibu tunggal di Jepang. Collins (1990) menjelaskan sebab perempuan mendapat diskriminasi dua kali lipat dibanding laki-laki, dalam hal ini menyangkut kasus yang dihadapi Sara. Pertama, yakni karena ia berjenis kelamin perempuan dalam masyarakat dengan hierarki yang didominasi laki-laki. Kedua, karena dia merupakan kaum minoritas (*Nikkei Burajiru-jin*) dibawah kaum mayoritas (masyarakat Jepang). Ketiga, adanya hierarki dalam konteks sosial maupun akademik serta posisi.

Morita (2017) menjelaskan bahwa di tempat kerja, proses interaksi *Nikkei Burajiru-jin* ke masyarakat asli Jepang cenderung sangat minimal dan secara umum hanya terpusat pada urusan pekerjaan. Selain itu, terdapat juga anggapan mereka sebagai pekerja yang pemalas, lambat, dan sembrono. Hal ini terjadi karena keterbatasan bahasa Jepang para *Nikkei Burajiru-jin*, sehingga tidak dapat menyampaikan dan menerima informasi dengan baik. Anggapan bahwa mereka yang tidak akan selamanya bekerja

di satu tempat membuat warga asli Jepang ragu akan loyalitas para *Nikkei Burajiru-jin*.

Perilaku diskriminatif perusahaan Jepang terhadap *Nikkei Burajiru-jin* masih berlangsung hingga pada saat ini. Kejadian ini pun semakin terlihat jelas di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laman berita CHUKYO TV (2020), sebanyak 1 dari 4 orang *Nikkei Burajiru-jin* kehilangan pekerjaan karena penyebaran virus baru COVID-19. Salah satu informan dalam wawancara bahkan meskipun ia telah mengabdikan selama 17 tahun di perusahaan, perusahaannya tetap tidak mempertahankan dan memecatnya. Hal ini tentu saja dapat terjadi karena *Nikkei Burajiru-jin* menempati pekerjaan tidak stabil, sehingga mereka dapat digantikan atau diberhentikan kapan saja.

Menurut Nishida (2017), semenjak kapasitas pekerjaan menurun pada krisis ekonomi di tahun 2008-2009 serta bencana tsunami dan nuklir Fukushima pada tahun 2011, tren bagi *Nikkei Burajiru-jin* untuk migrasi ke Jepang mulai menurun dan migrasi kembali ke Brazil meningkat. Salah satu titik terendahnya adalah pada saat tahun 2014 dengan populasi sekitar 177,000 *Nikkei Burajiru-jin* yang tinggal di Jepang. Jumlah tersebut sangat rendah dibandingkan pada saat tahun 2007 dengan populasi sekitar 310,000 *Nikkei Burajiru-jin* yang tinggal di Jepang. Pemerintah Jepang yang mengeluarkan program kependudukan untuk menarik kembali minat pekerja asing di Brazil tidak dapat membuahkan hasil signifikan karena mayoritas penduduknya sudah familier dengan perilaku diskriminatif warga asli Jepang terhadap *Nikkei Burajiru-jin* (Asia Nikkei, 2018).

Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Krisis Multikulturalisme di Jepang

Pada Maret 2006, pemerintah Jepang mendeklarasikan koeksistensi multikultural sebagai tanggapan atas diversifikasi masyarakat Jepang yang semakin meningkat. Seperti yang dipaparkan oleh Kymlicka (2011) bahwa salah satu aspek dari munculnya masyarakat multikultural adalah adanya migrasi suatu kelompok ke suatu wilayah yang baru. Meskipun pemerintah ketergantungan dengan migran asing dan telah dideklarasikan konsep multikulturalisme, nampaknya kedatangan para migran asing masih tidak diterima baik oleh penduduk lokal Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dianggap pendatang yang tidak bisa menyesuaikan dengan tatanan sosial masyarakat Jepang karena berbeda kultur. Sehingga penduduk asing tidak diakui oleh masyarakat Jepang. Pemerintah Jepang sendiri juga tidak mempunyai inisiatif dalam memperjuangkan hak-hak penduduk asing yang menetap di Jepang.

Dalam kasus posisi yang rentan *Nikkei Burajiru-jin*, pernah terjadi peristiwa dimana kelompok mereka ditindas dan mengalami pengusiran secara tidak langsung baik oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka maupun pemerintah Jepang. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2008-2009 ketika Jepang mengalami resesi ekonomi karena krisis finansial dunia. Perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang yang kehilangan pendapatan mengurangi produksi sehingga mengurangi kapasitasnya tenaga kerja. Para *Nikkei Burajiru-jin* merupakan golongan yang rentan kehilangan pekerjaan terhadap fluktuasi krisis ekonomi pada periode tersebut. *Nikkei Burajiru-jin* menjadi kehilangan pekerjaan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan dipaksa untuk kembali ke

negara asalnya. Hal tersebut memicu reaksi negatif dari penduduk *nikkei* (terutama *Nikkei Burajiru-jin*) karena merupakan pengumuman mendadak dan dianggap sebagai bentuk pengusiran mereka dari Jepang. Aksi tersebut juga dianggap sebagai upaya pemerintah Jepang untuk menindas kelompok minoritas.

Tsuda (dalam Weiner, 2009) menyatakan bahwa Kementerian Kehakiman Jepang yang bertanggung jawab atas keimigrasian dan naturalisasi warga asing mengambil posisi paling konservatif diantara semua kementerian negara Jepang. Mereka percaya bahwa homogenitas etnis dan kemurnian budaya sangat penting untuk keamanan domestik dan kestabilan sosial di Jepang. Seorang pejabat Menteri Kehakiman Jepang menyatakan (dalam Tsuda (2010) sebagai berikut:

“Penerimaan para nikkei merupakan suatu kesalahan besar dan harus dipertimbangkan lagi. Banyak di antara mereka yang tidak bisa berbahasa Jepang dan anak-anak mereka yang seringkali berhenti sekolah dan itu harus dihentikan”

Peristiwa di atas dengan jelas menunjukkan bahwa *Nikkei Burajiru-jin* mengalami hambatan berasimilasi dengan warga asli Jepang karena perbedaan kultur dan anggapan kelompok minoritas. Bukan hanya dari pemerintah, dari masyarakat harus ada pengakuan yang dibuat dalam pengaturan khusus agar budaya minoritas dapat bertahan dan berkembang di arena publik. Kegagalan masyarakat Jepang dalam menerapkan multikulturalisme juga dapat diidentifikasi dari komunikasi lokal yang dibentuk oleh *Nikkei Burajiru-jin* sebagai bentuk ‘kesadaran kelas’ (*class consciousness*) yang dapat mempersatukan kepentingan kelompok

minoritas. Bukan hanya perkumpulan komunitas, mereka juga berhasil menciptakan fasilitas untuk kepentingan sesama *Nikkei*. Fasilitas tersebut meliputi toko Brazil, supermarket Brazil yang menjual barang-barang lokal khas Brazil, restoran Brazil dengan menu makanan khas Brazil, sekolah internasional Brazil, dan layanan dalam bahasa Portugis.

Faktanya, meski Jepang tidak dapat memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas, Jepang masih membutuhkan mereka. Pada tahun 2018, Jepang mengeluarkan kebijakan baru bagi *Nikkei Burajiru-jin* yang berminat untuk bekerja di Jepang. Program ini diperuntukkan pemuda di usia 18 sampai 30 tahun dengan izin tinggal hingga 5 tahun di Jepang. Pemerintah Jepang menjanjikan dalam program ini bahwa *Nikkei Burajiru-jin* tidak akan dianggap sebagai imigran namun sebagai rekan negaranya. Sayangnya, program ini tidak mendapatkan respon baik dari pemuda *Nikkei Burajiru-jin* dan justru mendapat kecaman karena telah memperlakukan *Nikkei Burajiru-jin* sebagai pekerja tidak terampil untuk jangka waktu terbatas (Asia Nikkei, 2018).

Yoshihiro Takemura (dalam Mitchell, 2016), seorang kepala salah satu lembaga swasta Lembaga Pertukaran Budaya Hamamatsu mengungkapkan bahwa pada dasarnya, Jepang tidak dapat bertahan tanpa adanya kehadiran pekerja asing. Ia berpendapat bahwa pemerintah Jepang harus menangani permasalahan krisis multikulturalisme sesegera mungkin karena hal tersebut dapat berdampak bagi kemajuan ekonomi Jepang. Pendapat ini bahkan kembali dipertegas dalam artikel berita The Japan Times (2020) yang dalam bahasa Indonesia berjudul "Pekerja asing adalah kunci untuk menjaga daya saing ekonomi Jepang". Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa Jepang diperkirakan akan kekurangan setidaknya 1,3 juta

pekerja selama empat tahun ke depan. Oleh sebab itu, Jepang tidak memiliki pilihan selain meningkatkan jumlah pekerja asing yang masuk ke negaranya jika ingin mempertahankan posisi ekonomi globalnya.

Simpulan

Para *Nikkei Burajiru-jin* yang memutuskan untuk tinggal dan bekerja di Jepang rela untuk mengalami "*declassing*" atau kehilangan status sosial mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih menjanjikan. Akan tetapi secara sosial, sebagai kelompok minoritas mereka kerap mendapatkan perilaku diskriminatif karena adanya sifat homogenistik masyarakat asli Jepang.

Nikkei Burajiru-jin terkonsentrasi bekerja di bidang manufaktur otomotif di prefektur Aichi dan prefektur Shizuoka. Perlakuan diskriminasi terhadap mereka tidak terhindari. Hal ini dibuktikan dari jumlah *Nikkei Burajiru-jin* yang bekerja sebagai pekerja tidak terampil. Keterbatasan jenjang karir yang mereka alami menunjukkan adanya disintegrasi sosial yang diciptakan oleh masyarakat Jepang yang meyakini bahwa mereka masyarakat homogen. Kurangnya kemampuan bahasa Jepang dan perilaku kultur yang berbeda menjadi pertimbangan masyarakat asli Jepang untuk memberikan stereotip kepada *Nikkei Burajiru-jin*. Akibatnya, dalam masa krisis ekonomi Jepang, *Nikkei Burajiru-jin* kerap menjadi korban yang mengalami kehilangan pekerjaan karena status mereka sebagai pekerja kontrak.

Di sisi lain, perbedaan upah antara pekerja Jepang dan Brazil yang berbeda terus mendorong pemuda *Nikkei Burajiru-jin* untuk bekerja di Jepang. Tak hanya dari yang berpendidikan rendah namun justru pemuda yang mempunyai pendidikan dengan jenjang tinggi dan kuliah di

universitas ternama pun pergi ke Jepang. Alasannya untuk mencari pengalaman di luar negeri dan menghasilkan uang dengan minim usaha. Upah tinggi menjadi alasan pemuda *Nikkei Burajiru-jin* untuk tetap bekerja di Jepang meskipun berada di sektor pekerjaan tidak terampil.

Sifat homogenistik Jepang secara konsisten menolak hal-hal yang bersifat asing. Adanya perbedaan "*ethnic qualities*"

atau sifat antara para *Nikkei Burajiru-jin* dan masyarakat asli Jepang berpotensi sebagai pemicu konflik antar kedua kelompok sosial tersebut. Selain itu, adanya preferensi perilaku atau karakteristik tertentu terhadap suatu kelompok sosial menunjukkan adanya resistansi masyarakat Jepang terhadap konsep negara multikulturalisme.

Referensi

- Aichi Prefectural Government. (2021). *The Number of Foreign Resident in Aichi Prefecture December 2020*. <https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/gaikokuzinjuminsu-2020-12.html>
- Arte Osaka. (2015). *Characteristics of Brazilian Workers and Tips for Guidance*. <https://arte-kigyoo.com/page-772/page-1491>
- Asia Nikkei. (2018). *Japanese Brazilians Snub Tokyo's Diaspora residency Program*. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Japanese-Brazilians-snub-Tokyo-s-diaspora-residency-program>
- Barakoska, A. (2013). Multiculturalism as important characteristic of contemporary education. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 1(1).
- Bellini, M. U. (2006). *Life Stories of Nikkeijin Seeking Better Opportunities: The Motivation of Brazilian Immigrants in Japan*. Brigham Young University.
- Bryman. (2012). *Social Research Method 4th Edition*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- CHUKYO TV. (2020). *Corona is Trouble For Foreign Workers*. <https://www.ctv.co.jp/news/articles/o4s3vyqrsyi56916.html>
- Collins, P. H. (1990). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- Ferguson, C. (2008). Promoting social integration. *United Nations Department of Economic and Social Affairs for the Expert Group Meeting on Promoting Social Integration*. <https://doi.org/10.1177/14680181090090010804>
- Goto, J. (2007). *Latin Americans of Japanese Origin (Nikkeijin)*.
- Graburn, & Earl. (2008). *Multiculturalism in the New Japan: Crossing the Boundaries Within*. University of California.
- Higashi Mikawa Regional Research Center. (2019). *Residential foreigner in the Higashi Mikawa Area*.
- Ishikawa, E. A. (2015). Transnational Migration between Brazil and Japan: Implication on Brazilian children's Education. *Shizuoka University of Art and Culture Bulletin*, 15, 1–8.
- Iskandar, K. (2019). *Komunikasi Lintas Budaya Dalam Relasi Kerjasama Global Studi Kasus: Interaksi*

- Mahasiswa Indonesia Dan Pengajar*
Joppke, C. (2017). *Is Multiculturalism Dead? Crisis and Persistence in the Constitutional State*. Polity Press.
- Kingsberg, M. (2014). *Becoming Brazilian to Be Japanese: Emigrant Assimilation, Cultural Anthropology, and National Identity* [University of Colorado]. <https://doi.org/10.1017/S0010417513000625>
- Kymlicka, W. (2011). Multicultural citizenship within multinational states. *Ethnicities*, 11(3), 281–302. <https://doi.org/10.1177/1468796811407813>
- Mitchell, D. (2016). *Struggles of Second Generation Brazillians in Japan*. Retrieved From : <https://youtu.be/eC7xIRUVZ9w>
- Morita, L. (2017). The Potential of Bicultural Nikkeijin. Graduate School of Languages and Culture. *Nagoya: Nagoya University*. <https://doi.org/10.5430/sass.v4n1p21>
- Nishida, M. (2017). Diaspora And Identity - Japanese Brazilians In Brazil And Japan. In *Honolulu: Hawai'i Press*. <https://doi.org/10.1515/9780824874278>
- Rompay-bartels, I. Van. (2015). *Return or circular migration? The case of the Japanese Brazilians*. 71, 14–15.
- Rubington, E., & Weinberg, M. S. (2003). *The Study of Social Problems: Seven (Sensei) Di Jepang*. Global Komunika. *perspectives*. Oxford University Press.
- Sasaki, K. (2008). *Between Emigration and Immigration: Japanese Emigrants to Brazil and Their Descendants in Japan*. Senri Ethnological Reports.
- Steinberg, M. (2017). *Media Theory in Japan*. Duke University Press.
- Takenoshita, H. (2013). Labour Market Flexibilisation and the Disadvantages of Immigrant Employment: Japanese-Brazilian Immigrants in Japan. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 39(7), 1177–1195. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.778140>
- The Japan Times. (2020). *Foreign Workers Key to Maintaining Japan's Economic Competitiveness*.
- Tsuda, T. (2003). *Strangers in the Ethnic Homeland: Japanese Brazilian Return Migration in Transnational Perspective*. Columbia University Press.
- Tsuda, T. (2010). Ethnic Return Migration and The Nation-state: Encouraging the Diaspora to Return 'Home.' *Journal of the Association for The Study of Ethnicity and Nationalism*.
- Warsito, R. (2010). Pendidikan Multikultural. *Jurnal Tribakti*, 21(1), 1–13.
- Weiner, M. (2009). *Japan's minorities: the illusion of homogeneity* (Vol. 38). Taylor & Francis.